

Upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar Anak Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Sanggar Bimbingan

Diyat Nurrahman*¹, Dewi Triwahyuni²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipatiukur no 112-116, Bandung, Indonesia

e-mail: *¹diyatnurrahman63@gmail.com, ²d3withree@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the efforts of the Embassy of the Republic of Indonesia Kuala Lumpur in Improving Access to Basic Education for Children of Indonesia Migrant Workers through the Sanggar Guidance Program. In this study, the researcher tries to analyze what efforts are made by the Embassy of the Republic of Indonesia Kuala Lumpur in improving access to education for children of Indonesia migrant workers and the results of these activities for the national interest of Indonesia.

The research method used in this study is a qualitative method. In collecting the data, the researcher conducted literature studies, online searches, field observations, and interviews. As for the analysis technique, the researcher uses data redaction techniques.

The results of this study explain that the Embassy of the Republic of Indonesia in improving access to basic education for children of Indonesia migrant workers through the Guidance Studio Program, will provide good benefits and results for the national interests of Indonesia, and the Indonesian government can also carry out obligations in the law for the fulfillment of children's rights, especially in education.

Keywords — Diplomacy, Guidance program, Indonesia, Malaysia, Migrant,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai bagaimana upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar Anak Pekerja Migran Indonesia melalui Program Sanggar Bimbingan. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menganalisis apa saja Upaya yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur dalam meningkatkan akses pendidikan anak pekerja migran Indonesia dan hasil dari kegiatan tersebut untuk kepentingan nasional Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam mengumpulkan data-data, peneliti melakukan studi literatur, penelusuran Online, observasi lapangan, dan wawancara. Sedangkan untuk teknik menganalisis peneliti menggunakan teknik redaksi data.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam meningkatkan Akses Pendidikan Dasar Anak Pekerja Migran Indonesia melalui Program Sanggar Bimbingan, akan memberikan manfaat dan hasil yang baik untuk kepentingan nasional Indonesia, dan pemerintah Indonesia juga bisa menjalankan kewajiban di dalam undang-undang untuk pemenuhan hak-hak anak terutama pada bagian pendidikan.

Kata kunci — Diplomasia, Indonesia, Malaysia, PMI, Sanggar Bimbingan

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Di era yang saat ini serba mudah menjadikan mobilitas masyarakat dunia saat ini juga bertambah, hal itu di buktikan dengan banyaknya diaspora dari suatu negara yang berada di suatu negara lain. Globalisasi merupakan suatu integrasi internasional yang bertahap di antara entitas individu. Menurut Anthony Giddens, globalisasi diartikan sebagai peningkatan atau percepatan hubungan sosial antara negara-negara di seluruh dunia, yang menghubungkan berbagai tempat dan menyebabkan perubahan di antara mereka.

Dari fenomena globalisasi sendiri yang memang globalisasi sangat berkaitan dengan migrasi internasional, yang tidak hanya memperluas sebaran diaspora akan tetapi juga dapat memperkuat eksistensi mereka. Globalisasi sendiri juga berperan penting dalam interkoneksi diaspora, mengapa demikian karena mereka dihubungkan oleh jaringan informasi dan komunikasi yang saling mengenal dan membentuk komunitas.

Termasuk dengan hubungan antara Indonesia dan Malaysia yang dari dulu hingga saat ini mempunyai cakupan yang cukup luas, termasuk bagaimana cara pemerintah Indonesia maupun Malaysia meningkatkan Kerja sama antara dua negara khususnya dalam investasi dan pengiriman tenaga kerja. Banyaknya pekerja migran Indonesia yang datang ke Malaysia untuk bekerja baik yang melalui jalur resmi maupun ilegal jumlahnya cukup banyak. Mengutip dari situs *United Nations International Organization for Migration* (UN IOM) Indonesia, saat ini per tanggal 25 Oktober 2023 jumlah PMI yang berada di Malaysia berjumlah 2,7 juta PMI 1,6 juta melalui jalur reguler dan sisa diantara-Nya melalui jalur non reguler, atau menjadi buruh kasar (*United Nations International Organization for Migration, 2023*).

Dari data di atas menunjukkan bahwa hanya 2,7 juta pekerja migran Indonesia yang tercatat dan resmi masuk ke Malaysia untuk bekerja, sedangkan di kutip dari situs Satgas P2MI Projo yang menyebutkan bahwa pekerja migran Indonesia yang bersifat ilegal yang masuk ke Malaysia mencapai 1.3 juta orang per tahun 2023. Karena jumlah pekerja migran Indonesia yang tadi sudah di jelaskan jumlahnya sangat banyak itu juga memunculkan masalah baru yakni anak PMI yang tidak mempunyai surat resmi, tidak bisa mendapatkan pendidikan seperti anak pada umumnya (Satgas P2MI Projo, 2023).

Dari data yang peneliti temukan terdapat 2.653 anak-anak di Malaysia di bagian pulau Borneo tepatnya di Sarawak, yang mengikuti sanggar bimbingan di sana, dan sekitar 21.000 anak-anak PMI yang berada di kota Kinabalu, Malaysia, memang mayoritas anak-anak PMI tersebut banyak berada di Kota Sabah dan Sarawak (Kantor Staf Presiden, 2023).

Problem terkait pendidikan bagi anak-anak pekerja migran Indonesia ini harus diselesaikan oleh pemerintah. Pemerintah melalui KBRI Kuala Lumpur yang bertugas sebagai kantor perwakilan Indonesia di Malaysia yang memiliki peran untuk menangani permasalahan tersebut, KBRI Kuala Lumpur melalui Atdikbud telah melakukan upaya untuk menangani permasalahan tersebut salah satunya dengan membuat Sanggar Bimbingan yang mana sanggar bimbingan tersebut di peruntukan untuk anak-anak PMI yang tidak memiliki surat-surat resmi.

Sanggar Bimbingan yang didirikan oleh Atase Bidang Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur ini merupakan suatu lembaga pendidikan non formal, dimana sanggar bimbingan ini di bentuk untuk memfasilitasi anak-anak PMI yang tidak memiliki surat resmi agar memperoleh akses pendidikan dasar yang

layak. KBRI Kuala Lumpur melalui Atdikbud memiliki kurang lebih sekitar 55 sanggar bimbingan yang tersebar hampir di seluruh Malaysia.

Program Sanggar Bimbingan sendiri merupakan program yang dilanjutkan oleh Duta Besar Hermono yang sebelumnya terbentuk di duta besar periode sebelumnya, hal ini dikuatkan dengan adanya rapat koordinasi Duta Besar Hermono, Atase pendidikan Prof. Muhammad Firdaus, Kepala SIKL, Wakil Kepala Perwakilan, Atase Imigrasi dan Lokal Staf KBRI Kuala Lumpur, dari data yang peneliti temukan dari rapat koordinasi yang diselenggarakan KBRI di Port Dickson, Negeri Sembilan, Malaysia. Menjelaskan dari tahun 2019 – 2022 sudah berdiri 32 Sanggar Bimbingan yang perinciannya 30 Sanggar Bimbingan setara Sekolah Dasar (SD) dan 2 Sanggar Bimbingan setara Sekolah Menengah Pertama (SMP), rapat koordinasi itu juga menekankan perlu adanya diskusi lebih lanjut mengenai *stakeholder* untuk pengembangan layanan pendidikan formal dan non-formal yang berada pada semenanjung Malaysia. (Sekolah Indonesia Kuala Lumpur).

Program SB yang didirikan oleh KBRI Kuala Lumpur, dalam menjalankan segala aktivitas sanggarnya di dukung oleh pendanaan dari KBRI Kuala Lumpur sendiri serta di dukung oleh Yayasan Muhammadiyah cabang Istimewa sebagai Lembaga yang bekerja sama dengan KBRI untuk menyelenggarakan Sanggar Bimbingan di Malaysia, dan KBRI Kuala Lumpur sendiri juga menjalin hubungan dengan Universitas di Indonesia untuk melakukan KKN Internasional (Antaranews).

Dan dalam mendirikan program sanggar bimbingan di semenanjung Malaysia ini tidak semudah yang di perkirakan karena dalam hal ini Pemerintah Malaysia tidak mengizinkan layanan seperti CLC yang ada terlebih dahulu di Malaysia bagian timur atau

Sabah dan Sarawak. Akan tetapi dengan usaha dan tekad yang kuat Pemerintah Indonesia melalui perpanjangan KBRI Kuala Lumpur, melakukan beberapa koordinasi dengan Pemerintah Malaysia dan beberapa Lembaga Masyarakat yang berada di Malaysia, sehingga membuahkan hasil yang dimana pemerintah Malaysia mengizinkan pembentukan Sanggar Bimbingan dengan catatan semua sanggar bimbingan terkoordinasi terpusat oleh Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), yang dimana semua sanggar bimbingan yang berada pada Semenanjung Malaysia berkoordinasi dengan SIKL (AntaraKL, 2023).

1.2. Rumusan Masalah

1.2.1. Rumusan Masalah Mayor

“Bagaimana Upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar Anak Pekerja Migran Indonesia Melalui Program Sanggar Bimbingan”.

1.2.2. Rumusan Masalah Minor

Dalam penelitian ini masalah yang akan di angkat oleh peneliti tentu akan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Maka identifikasi masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa saja program yang dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur melalui Sanggar Bimbingan?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak-anak pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur melalui Sanggar Bimbingan?
3. Bagaimana Diplomasi yang dilakukan Indonesia terhadap Malaysia dalam pembentukan program Sanggar Bimbingan?
4. Apa saja kendala eksternal dan internal yang KBRI Kuala Lumpur hadapi dalam meningkatkan akses pendidikan dasar anak pekerja migran Indonesia melalui Sanggar Bimbingan?

5. Bagaimana hasil KBRI Kuala Lumpur dalam memberikan akses pendidikan dasar melalui program Sanggar Bimbingan?

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Hubungan Internasional

Hubungan internasional saat ini dapat di terjemahkan sebagai hubungan antar negara bangsa, konsep dari negara bangsa sendiri muncul dan berkembang setelah perjanjian Westphalia yang menggantikan konsep Kerajaan dan monarki yang ada pada saat itu dan sudah berabad-abad muncul di Eropa. Kemudian konsep negara bangsa ini menyebar dan meluas terutama setelah Perang Dunia II di mulai dari banyaknya negara bangsa terlahir di berbagai koloni dan penghapusan penjajahan di seluruh muka bumi termasuk lahirnya Indonesia pada saat itu.

Menurut Anak Agung Ayu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, dalam buku Pengantar Hubungan Internasional, studi hubungan internasional biasanya didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antara aktor yang melintasi batas negara. Karena saling ketergantungan dan kompleksitas kehidupan manusia di masyarakat internasional, hubungan internasional diperlukan (2005: 3-4). Tanpa hubungan internasional, negara tidak dapat menutup diri terhadap negara luar. Selain itu, perang dingin dunia telah berakhir dan saat ini sedang mengalami masa transisi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hal itu berdampak pada penelitian hubungan internasional yang berkembang pesat. Politik antar negara bukanlah satu-satunya topik dalam hubungan internasional modern; topik lain, seperti terorisme, juga menjadi perhatian.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa hubungan internasional melibatkan kolaborasi antara negara-negara unit politik

yang diakui secara global untuk mengatasi berbagai permasalahan, ini melibatkan interaksi antara bangsa, kelompok nasional, komunitas global, serta kekuatan dan proses yang mempengaruhi pola pikir, perilaku dan gaya hidup. Dalam konteks ini terdapat sejumlah besar interaksi antara negara dan komunitas internasional (Darmayadi, 2015).

2.1.2. Diplomasi

Diplomasi berasal dari Bahasa Yunani yang memiliki arti "melipat dua" atau "memiliki dua", yang mirip dengan konsep duplikasi. Selain itu, kata ini juga dikaitkan dengan makna "menipu" atau "bermuka dua", seperti yang sering diasosiasikan dengan perilaku seseorang yang berkata sesuatu sambil memberikan isyarat yang berbeda. Secara historis, "diplomasi" juga merujuk pada dokumen resmi atau arsip yang disimpan di kantor pemerintahan, serta tugas dari orang yang bertanggung jawab menyimpan dokumen tersebut.

Diplomasi didefinisikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan hubungan luar negeri atau pelaksanaan kebijakan luar negeri. "Diploma" dalam konteks ini mengacu pada surat kepercayaan yang diberikan kepada perwakilan resmi suatu negara. Lebih lanjut, Lord Strang menjelaskan bahwa diplomasi adalah pengelolaan hubungan antarnegara melalui perwakilan tetap yang telah ditunjuk untuk tugas tersebut (Lord Strang, 1954)

Menurut Schmelzing (1966) dalam bukunya *Systematischer Grundriss des Völkerrechts*, diplomasi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan dan kepentingan resmi suatu negara di luar negeri. Diplomasi juga mencerminkan keinginan suatu bangsa dan negara untuk membangun hubungan dengan negara lain dalam berbagai aspek serta melakukan negosiasi, baik secara lisan maupun tertulis. KM Panikkar dalam *The Principle and Practice of Diplomacy* menyebutkan bahwa diplomasi adalah seni dalam menentukan prioritas dan mengelola

kepentingan nasional suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.

2.1.3. Kepentingan Nasional

Dalam ilmu hubungan internasional, ada interaksi yang dilakukan oleh aktor negara (*state actor*) yang berguna untuk mencapai kepentingan nasional dari masing-masing negara karena kepentingan nasional bisa menjelaskan seberapa jauh suatu negara dalam mencapai kepentingan tersebut. Kepentingan nasional juga merupakan tujuan dan faktor penentu yang membimbing para pembuat Keputusan negara dalam merancang suatu kebijakan luar negerinya, Hans J. Morgenthau juga menjabarkan konsep kepentingan nasional sebagai berikut: yang pertama perlindungan terhadap identitas fisik negara yaitu kemampuan untuk mempertahankan integritas wilayahnya, kedua yaitu perlindungan terhadap identitas politik yang berarti menjaga stabilitas ekonomi dan politiknya, dan yang ketiga perlindungan terhadap identitas budaya, yang melibatkan pemeliharaan Bahasa dan sejarahnya. Kepentingan nasional suatu negara juga hasil dari Keputusan pembuat kebijakan sehingga kepentingan tersebut bervariasi atau bahkan bertentangan antara negara yang satu dengan lainnya (Yani,dkk, 2017: 17).

Menurut Hans J. Morgenthau, kepentingan nasional juga mencakup berbagai elemen yang secara logis terkait dengan elemen seperti kekuasaan dan kepentingan, yang merupakan sarana dan tujuan dari kegiatan politik internasional. Konsep ini diputuskan oleh negara yang bersangkutan berdasarkan tradisi politik dan budaya di luar negeri. Selain itu, kepentingan nasional dapat didefinisikan sebagai tujuan utama dan faktor penentu yang memengaruhi pembuat kebijakan di luar negeri. Kepentingan nasional secara khusus mencakup elemen-elemen yang membentuk kebutuhan negara utama, seperti pertahanan, keamanan, militer, dan

kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani, 2005: 35).

2.1.4. Hak Asasi Manusia

Hak merupakan hak yang dimiliki setiap individu. Dengan mengakui hak orang lain, tindakan mereka dibatasi dan pemegang hak memiliki kemampuan untuk menyembunyikan segala pelanggaran ke dalam objek yang dilindungi. Hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dihilangkan yang dimiliki seseorang. Arus balik utama ke nilai-nilai politik nyata adalah gagasan yang disebut Henkin sebagai "ide kita zaman" (Kegley & Raymond, 2014: 224).

Hak Asasi Manusia telah menjadi subjek utama perhatian hukum internasional. Organisasi internasional berpendapat bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas perlakuan dan kehidupan yang layak (Sharp, 2018: 214).

Hak asasi manusia juga selain dari memperhatikan hukum internasional, Hak asasi manusia juga memperhatikan hukum nasional dari satu negara, yang dimana hukum nasional tersebut di ambil dari hukum internasional dan konvensi internasional dan diratifikasi menjadi hukum kebiasaan di suatu negara yang bersangkutan.

Konsep perlindungan didasarkan pada konvensi internasional tentang perlindungan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya. Konvensi ini menyatakan bahwa pekerja migran dan anggota keluarganya harus memiliki kebebasan untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negara asal mereka, kecuali jika diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan dan moral umum, atau hak-hak dan kebebasan orang lain. Pekerja migran dan anggota keluarganya juga harus memiliki hak untuk setiap saat memasuki dan tinggal di negara asalnya.

2.1.5. Hak Anak

Hak dapat di definisikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh setiap individu sejak awal keberadaannya dalam kandungan ibunya. Pembahasan mengenai hak secara alami melibatkan kewajiban, karena keduanya saling terkait dan dapat menimbulkan konsekuensi dari suatu masalah. Kewajiban yang dimaksud disini adalah Tindakan yang dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anak atau sebaliknya. Kewajiban orang tua dalam melindungi anak dalam lingkungan keluarga menjadi hal utama dan pentingnya menekankan kewajiban orang tua terhadap hak-hak dalam memastikan masa depan yang berkualitas dan kesejahteraan anak yang terjamin.

Orang tua merupakan fondasi utama dalam keluarga yang berperan besar dalam membentuk karakter dan kepribadian anak melalui pendidikan dan pengasuhan. Anak-anak yang tumbuh dengan kehadiran orang tua cenderung memiliki kemampuan lebih baik dalam beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan baru serta masyarakat sekitarnya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, hak-hak anak dapat dipenuhi dengan dukungan orang tua.

Perlindungan anak mencakup segala upaya untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabatnya sebagai manusia, serta terlindung dari diskriminasi dan kekerasan. Untuk menciptakan generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, perlindungan ini harus dimulai sejak kelahiran hingga usia 18 tahun.

Menurut pasal 4 juncto pasal 18 undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terdapat beberapa hak-hak anak yang harus dipenuhi antara lain:

Pasal 4

“Setiap anak berhak mendapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 5

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”

Pasal 9

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan Tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”

Pasal 15

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, kejahatan seksual”

2.1.6. Migrasi Internasional

Migrasi Internasional merupakan kajian Multi dan lintas disiplin ilmu pengetahuan dengan pintu masuk, corak, nuansa, sudut pandang, analisis, dan tekanannya yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan suatu taman yang di hiasi dengan beragam bunga berwarna berbeda, jauh

dari deretan baris Perkebunan monokultur yang monoton. Migrasi juga di lihat sebagai suatu fenomena sosial, maka cakrawala membangun teori akan semakin luas, dari pada hanya memunculkan percakapan teknokrasi.

Migrasi sendiri berasal dari Bahasa latin dari migrates yang bermakna pergi atau berpindah, jadi secara istilah migrasi sendiri ialah suatu aktivitas individu yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Aktivitas ini kemudian membentuk ruang-ruang kehidupan berkelompok dan memperkenalkan batas-batas wilayah. Serta ikatan kelompok sosial budaya dalam membentuk organisasi kecil.

Migrasi internasional dapat di konseptualisasikan sebagai sebuah sistem dengan beberapa kekuatan yang mendorong pergerakan jarak beroperasi sebagai salah satu dari beberapa gesekan, dengan jalur yang dihasilkan dicatat pada bidang abstrak atau peta suatu wilayah tertentu. Dalam bentuk yang paling abstrak, model semacam ini juga hampir sama dengan model fisika dari ada ilmu sosial (Cesario, 1975).

2.2. Kerangka Pemikiran

Setiap negara tentu memiliki tujuan dan kepentingan nasional yang harus di capai, untuk setiap negara negara tentunya untuk menjalin kerja sama dengan negara lain. Konsep kepentingan nasional ini perlu dimengeri bahwasanya agar kita dapat memahami perilaku internasional.

Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur ini dalam menjalin kepentingan negara Indonesia yaitu dengan memberikan akses pendidikan bagi anak pekerja migran Indonesia yang berada di wilayah Malaysia. Senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia lewat diplomasi dan tetapi menjadi hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia agar kepentingan nasional Indonesia tetap bisa tercapai.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti ambil adalah kualitatif, dengan menggunakan teknik studi Pustaka, dengan menelaah, membaca, memahami buku, teori, opini, dan jurnal yang relevan terkait tema penelitian, serta di dukung oleh data wawancara dan observasi lapangan secara langsung. Dengan teknik studi kepustakaan dan observasi lapangan peneliti dapat mengumpulkan data primer dan sekunder yaitu dengan langsung mengamati langsung bagaimana Upaya Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar Anak Pekerja Migran Indonesia melalui Program Sanggar Bimbingan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Program KBRI Kuala Lumpur melalui Sanggar Bimbingan

Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung Pendidikan dan kesejahteraan PMI di Malaysia, KBRI di Kuala Lumpur melalui atase Pendidikan telah meluncurkan berbagai program untuk sanggar bimbingan. Program -program ini di rancang untuk membantu anak-anak PMI, terutama mereka yang menghadapi keterbatasan akses terhadap Pendidikan formal. Melalui inisiatif ini KBRI Kuala Lumpur berupaya memberikan bimbingan akademis, pengembangan karakter, serta keterampilan yang relevan bagi para siswa, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berpengetahuan. Program-program yang dijalankan oleh KBRI Kuala Lumpur untuk mendukung proses berjalannya sanggar bimbingan.

4.1.1. Pengadaan Tenaga Pengajar

Salah satu program yang di terapkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk mengefektifkan jalannya sanggar bimbingan yang ada di Malaysia ialah dengan

cara menyediakan tenaga pengajar baik itu dari kerja sama KBRI Kuala Lumpur dengan universitas yang ada di Indonesia atau menyediakan tenaga pengajar dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Tenaga pengajar yang disiapkan antara lain:

1. Kampus yang ada di Indonesia

Tenaga pengajar ini biasanya di datangkan langsung dari Indonesia yang notabenehnya mahasiswa yang hendak melakukan KKN atau mahasiswa yang melakukan praktik kerja lapangan untuk profesi keguruan, Kedutaan Republik Indonesia Kuala Lumpur melalui atase pendidikannya melakukan beberapa Kerja sama dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia untuk menyediakan mahasiswanya untuk menjadi tenaga sukarelawan mengajar di beberapa sanggar bimbingan yang ada di Malaysia. Beberapa kampus tersebut yang peneliti temukan saat observasi di lapangan yaitu IPB University dan IAIN Madura, mahasiswa dari 2 universitas tersebut mengajar di sanggar bimbingan segambut dan PPWNI Klang SD, dengan program studi yang mereka ampu yaitu pendidikan dan kemasyarakatan. Mahasiswa-mahasiswa tersebut biasa mengajar dalam rentang waktu 1 – 3 bulan (Shohehudin, 2024).

2. Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL)

KBRI Kuala Lumpur melalui ADIKBUD, senantiasa melakukan kewajibannya untuk memberikan akses Pendidikan kepada seluruh anak-anak ber-kewarganegaraan Indonesia untuk mengenyam Pendidikan yang layak. Dari sini Kedutaan Besar Republik Indonesia membuka satu pusat Pendidikan dan kebudayaan di Kuala Lumpur yaitu SIKL. Dalam permasalahan akses Pendidikan dasar untuk anak PMI yang berstatus ilegal dan tidak memiliki surat resmi KBRI berkoordinasi dengan SIKL untuk menyediakan tenaga pengajar yang formal bagi siswa-siswi di

sanggar bimbingan yang berada di Malaysia. SIKL menyediakan tenaga pengajar bagi beberapa sanggar bimbingan untuk mengajar secara formal selama 2 minggu 1 kali dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak di sanggar bimbingan (Haidir, 2024).

Sekolah Indonesia juga memiliki peran yang tidak hanya sebagai tenaga pengajar saja akan tetapi guru-guru dari SIKL juga menjadi pengarah dalam metode dan kurikulum yang di ajarkan kepada setiap sanggar bimbingan. Karena setiap sanggar bimbingan yang berada di seluruh Malaysia masih belum sesuai secara kurikulum yang di ajarkan.

3. Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia

Selain dari dua diatas KBRI Kuala Lumpur juga menjalin kerja sama dan koordinasi dengan Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia untuk guna memberikan tenaga sukarelawan untuk bisa mengajar ke beberapa sanggar bimbingan yang berada di Malaysia. Mengajarkan mata Pelajaran yang sesuai dengan keilmuan mereka di kampus tempat mereka mengenyam pendidikan. Dan mahasiswa Indonesia yang berada di Malaysia itu juga berkoordinasi KBRI Kuala Lumpur untuk melakukan kegiatan tersebut.

Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia ini juga berperan aktif dalam ikut serta untuk memberikan akses Pendidikan dasar kepada anak-pekerja migran Indonesia yang berstatus tidak berdokumen resmi, biasanya para pelajar Indonesia di Malaysia ini akan mengajar di beberapa sanggar bimbingan di Malaysia Ketika di kampus mereka sedang libur semester, atau ada juga yang memang rutin setiap 2 minggu sekali untuk mengajar di beberapa sanggar bimbingan arena memang Lokasi sanggar bimbingan tidak terlalu jauh dengan kampus atau asrama mereka.

4.1.2. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

KBRI Kuala Lumpur juga mempunyai program untuk sanggar bimbingan yaitu

dengan membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tanpa batas kuota untuk jumlah di setiap sanggar bimbingannya jadi setiap tahunnya anak-anak pekerja migran Indonesia bisa mendaftar masuk ke setiap sanggar bimbingan. Dan dari PPDB ini KBRI melalui koordinasi dengan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur untuk mendaftarkan seluruh siswa-siswi yang daftar ke sanggar bimbingan untuk mendapatkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang nantinya berguna untuk siswa tersebut melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi di Indonesia maupun ke Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (Haidir, 2024).

Dari program ini juga Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur berharap banyak dari pekerja migran Indonesia agar dapat mendaftarkan anak-anaknya ke sanggar bimbingan atau ke Sekolah Indonesia Kuala Lumpur bagi yang memiliki dokumen resmi bagi yang tidak di harapkan dapat mendaftarkan anak-anaknya ke sanggar bimbingan yang dekat dengan wilayah tempat tinggal mereka.

4.1.3. Program Beasiswa

KBRI Kuala Lumpur memberikan beberapa program guna untuk menjalankan sanggar bimbingan, dengan menyediakan program beasiswa yang diatur oleh Kemendikbud yang berguna untuk bisa memulangkan anak-anak pekerja migran Indonesia supaya mereka bisa untuk melanjutkan pendidikannya di Indonesia. Beasiswa ini di program oleh KEMENDIKBUD Republik Indonesia yang di atur dalam dua skema beasiswa yaitu beasiswa ADIK dan ADEM.

Beasiswa ADIK sendiri merupakan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi yang diperuntukkan untuk siswa-siswi yang melanjutkan pendidikannya ke tingkat lebih tinggi yang berada diseluruh Indonesia, dan

beasiswa ini juga di peruntukan untuk Masyarakat dengan kendala dan kondisi ekonomi yang cukup rendah. Beasiswa ini bersifat afirmasi atau yang di tanggung seluruh biayanya oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Dan beasiswa ini juga banyak di berikan juga untuk siswa-siswi yang dari lulusan sanggar bimbingan dan lulusan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur.

Selain beasiswa ADIK ada juga beasiswa ADEM, beasiswa ini merupakan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah beasiswa ini juga program yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia, beasiswa ini diperuntukkan bagi siswa-siswa yang hendak melanjutkan sekolahnya ke jenjang menengah yang ada di seluruh Indonesia. Beasiswa ini juga tidak ada tidak ada Batasan kemampuan ekonomi jadi semua siswa-siswa yang ada di seluruh Indonesia bisa mendaftar kan dirinya untuk mendapatkan beasiswa tersebut.

Dengan dua program beasiswa ini KBRI Kuala Lumpur menyiapkan skema untuk pada siswa-siswi yang berada di sanggar bimbingan untuk bisa pulang dan melanjutkan studinya di Indonesia dengan skema beasiswa tersebut.

4.2. Pemenuhan Hak-Hak Anak PMI di Malaysia

KBRI Kuala Lumpur dalam memenuhi hak-hak anak PMI ialah dengan cara menyiapkan semua sanggar bimbingan dan membuka penerimaan siswa baru setiap tahunnya untuk anak tidak berdokumen, dan bagi anak-anak yang berdokumen bisa untuk bersekolah di sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang dari segi kurikulum dan legalitas sudah sah mendapatkan izin dari pemerintah Kerajaan Malaysia. Pemenuhan hak-hak itu juga Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur dengan beberapa pelayanan juga antara lain:

1. Pelayanan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK)

Kedutaan Republik Indonesia Kuala Lumpur melalui atase Konsuler senantiasa melayani warga negara Indonesia yang hendak melakukan pencatatan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK) yang memang sangat dibutuhkan untuk nantinya dokumen tersebut dipakai untuk membuat paspor atau visa affidavit untuk anak yang memang lahir dari kedua orang tua yang berbeda kewarganegaraan, dan SBPK ini juga dapat digunakan oleh anak pekerja migran yang berstatus tidak resmi guna untuk nantinya menjadi dokumen penguat untuk daftar di sanggar bimbingan dan menjadi dokumen penunjang untuk membuat SPLP dan mengikuti program pemulangan ke negara asal.

Pelayanan ini ialah hak yang diupayakan KBRI Kuala Lumpur guna memenuhi hak anak PMI Indonesia yang berada di Malaysia, agar anak PMI tersebut bisa mendaftarkan kelahiran anak-anak mereka di KBRI Kuala Lumpur, agar tercatat secara resmi dan terdaftar di Indonesia juga karena sistem pencatatan di Kedutaan sudah terintegrasi dengan baik dengan data pusat di Indonesia.

2. Pelayanan Keimigrasian

Selain pelayanan yang di dapatkan dari atase konsuler yang dimana mereka menerbitkan SBPK untuk para anak pekerja migran Indonesia, KBRI Kuala Lumpur melalui Atase Imigrasi, juga memberikan hak kepada anak-anak PMI untuk bisa mendapatkan dokumen yang seminimalnya paspor sebagai identitas WNI selama berada di luar negeri.

Pelayanan ini bisa di dapatkan oleh anak PMI yang berada di Malaysia dengan cara mendaftarkan anak mereka untuk mendapatkan dokumen paspor atau SPLP untuk anak-anak yang memang secara dokumen menetap di Malaysia masuk kedalam

kategori ilegal, karena bapak dan ibu mereka belum memiliki dokumen resmi untuk izin menetap di Malaysia. Dan SPLP ini juga bisa anak-anak pekerja migran Indonesia itu dapatkan dengan cara mendaftar ke sanggar bimbingan yang ada di Malaysia dan mendaftarkan beasiswa yang sudah di sediakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia melalui kerja sama dengan KEMENDIKBUD.

4.3. Diplomasi Indonesia terhadap Malaysia melalui Pembentukan Program Sanggar Bimbingan

Mengacu pada aturan konvensi Wina 1961 yang mengatur tentang hubungan diplomatik KBRI Kuala Lumpur sendiri menjadi kantor perwakilan yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah Indonesia yang berada di Malaysia juga memiliki peran lain yaitu untuk melindungi seluruh kepentingan yang dimiliki pemerintah Indonesia salah satunya dalam bidang pendidikan yang dimana hal ini mengacu pada pembentukan Program Sanggar Bimbingan yang di bentuk oleh KBRI Kuala Lumpur.

Fasilitas akses Pendidikan untuk anak-anak yang ber-kewarganegaraan Indonesia baik itu yang berdokumen resmi maupun yang ilegal, Kedutaan Besar Indonesia Kuala Lumpur sampai saat ini masih ada beberapa kendala dalam menjalankan tugasnya dalam membentuk sanggar bimbingan yang berada di seluruh Malaysia. Banyak Upaya dan diplomasi yang telah di lakukan oleh pemerintah Indonesia melalui tangan KBRI Kuala Lumpur.

KBRI Kuala Lumpur melalui atase Pendidikan dan kebudayaan telah mengupayakan diplomasi kepada pemerintah Malaysia guna untuk mendapatkan ijin dari pemerintah Malaysia untuk pembentukan sanggar bimbingan yang berada di Malaysia, karena sampai saat ini sanggar bimbingan yang berada di semenanjung Malaysia ini masih

bersifat ilegal dan belum ada izin resmi dari pemerintah Malaysia. Dan diplomasi Indonesia yang sudah dilakukan ialah antara lain:

1. Koordinasi dengan Pemerintah Malaysia

KBRI Kuala Lumpur dalam membentuk program SB yang berada di Malaysia, berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dan Pemerintah Malaysia dalam membentuk sanggar bimbingan. Karena sampai saat ini pemerintah Malaysia belum memberikan izin resmi untuk pembentukan SB yang ada di Malaysia, jadi status SB yang ada di Malaysia sampai saat ini masih ilegal. Akan tetapi KBRI Kuala Lumpur telah berusaha untuk melobi pemerintah Malaysia untuk permasalahan tersebut tapi belum kunjung menemukan titik terang akan hal itu.

2. Koordinasi dengan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia

KBRI melalui perpanjangan tangan ATDIKBUD Republik Indonesia juga berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia guna membicarakan permasalahan izin yang sampai saat ini belum bisa di berikan oleh pemerintah Malaysia terhadap pembentukan sanggar bimbingan yang ada di Malaysia. Diharapkan dengan begitu pemerintah Indonesia bisa untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Malaysia guna untuk membicarakan masalah perizinan.

Selain dari pada KBRI juga berupaya untuk membuat sanggar bimbingan di semenanjung Malaysia, mempunyai legalisasi yang jelas seperti CLC yang berada di Malaysia bagian timur khususnya negara bagian Sarawak dan Sabah. Karena CLC atau *Community Learning Centre* sendiri merupakan lembaga pendidikan non formal yang sama dengan sanggar bimbingan akan tetapi statusnya legal di pemerintah negara bagian Sabah dan Sarawak.

4.4. Kendala Eksternal dan Internal KBRI dalam Meningkatkan akses Pendidikan Dasar

Dalam menjalankan kegiatan pembelajaran dan meningkatkan akses Pendidikan dasar anak PMI yang berada di Malaysia, KBRI Kuala Lumpur sendiri banyak sekali mengalami tantangan dan kendala baik eksternal mau pun internal, antara lain:

4.4.1. Kendala Eksternal

Dalam menjalankan kegiatan pembelajaran program sanggar bimbingan, KBRI Kuala Lumpur mendapatkan beberapa kendala yang sampai saat ini belum kunjung terselesaikan. Kendala eksternal yang dihadapi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam menjalankan program ini ialah izin untuk membentuk dan mengadakan sanggar bimbingan yang berada di Malaysia. Kendala eksternal yang di hadapi oleh KBRI Kuala Lumpur dalam meningkatkan akses Pendidikan dasar ialah masih belum legalnya semua sanggar bimbingan yang berada di seluruh semenanjung Malaysia ini, karena dengan belum legalnya setiap sanggar bimbingan yang berada di semenanjung Malaysia ini dapat memicu masalah di kemudian hari karena dengan mengumpulkan semua anak PMI yang tidak memiliki dokumen resmi, mereka yang berada di sanggar bisa kapan pun di tangkap oleh pihak imigrasi Malaysia karena memang di Malaysia sendiri memang rutin terjadi penangkapan dan pengejaran oleh pihak imigrasi bagi pada WNA yang tidak memiliki dokumen resmi untuk tinggal di Malaysia.

4.4.2. Kendala Internal

Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur selain kendala eksternal untuk menjalankan program sanggar bimbingan, menghadapi beberapa kendala internal yang dihadapi dalam mengelola akses Pendidikan dasar bagi anak pekerja migran Indonesia ialah kurangnya tenaga pengajar untuk seluruh

sanggar bimbingan yang berada di semenanjung Malaysia, karena pada pemaparan yang peneliti dapatkan dari sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang sekaligus mengkoordinir kurikulum pembelajaran setiap sanggar bimbingan yang berada di semenanjung Malaysia. Kendala yang dihadapinya antara lain:

1. Kurangnya Tenaga Pengajar

Dalam menjalankan sanggar bimbingan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur menghadapi kendala yaitu kurangnya tenaga pengajar yang mau mengajar di beberapa SB yang di bentuk oleh KBRI Kuala Lumpur. Kendala ini cukup membuat setiap sanggar bimbingan yang di Kelola oleh atase Pendidikan kadang kala menjadi terbengkalai dalam proses belajar mengajarnya.

Kurangnya tenaga pengajar pada setiap sanggar bimbingan ini menjadi kendala internal yang cukup serius karena dari sekolah Indonesia Kuala Lumpur sendiri, hanya setiap 2 minggu sekali untuk guru-guru dari sekolah Indonesia Kuala Lumpur yang memberikan pengajaran secara formal sesuai kurikulum kepada sanggar bimbingan, itu pun tidak semua sanggar bimbingan mendapatkan fasilitas yang di berikan oleh guru-guru sekolah Indonesia kuala lumpur tersebut, karena keterbatasan tenaga dan biaya yang harus di dikeluarkan oleh sekolah Indonesia Kuala Lumpur (Haidir, 2024).

2. Pendanaan

Selain dari beberapa kendala yang sudah di sampaikan, Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur juga menghadapi kendala dari segi pendaan, karena dalam menjalankan dan membentuk setiap sanggar bimbingan yang berada di Malaysia. Karena dalam membentuk SB ini tidak sedikit mengeluarkan dana untuk menyewa tempat untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar khususnya pendidikan dasar yang

memang wajib di dapatkan setiap anak-anak ber-kewarganegaraan Indonesia. Pendanaan ini juga tidak hanya dari segi sewa tempat akan tetapi juga dari operasional yang di butuh kan oleh sanggar bimbingan (Shohehudin, 2024).

Menurut wawancara yang peneliti lakukan dengan staff KBRI Kuala Lumpur untuk prihal pendanaan sendiri KBRI Kuala Lumpur tidak ada anggaran pasti jumlahnya berapa untuk setiap sanggar bimbingan, akan tetapi kebutuhan setiap sanggar bimbingan sendiri terpenuhi tidak hanya dari anggaran KBRI akan tetapi dari dana CSR perusahaan dan beberapa sanggar bimbingan sendiri juga di bawah koordinasi dari organisasi kemasyarakatan seperti NU dan Muhammadiyah. Setiap sanggar bimbingan sendiri juga biasa menerima kunjungan dari universitas yang hendak melakukan pengabdian masyarakat di sanggar bimbingannya. Karena dari pemerintah Indonesia sendiri belum ada alokasi dana yang pasti untuk program sanggar bimbingan, karena memang sanggar bimbingan ini bukan merupakan badan atau Lembaga yang legal dan belum mendapatkan izin yang jelas.

4.5. Hasil Upaya Kbri dalam Memberikan Akses Pendidikan Dasar melalui Program Sanggar Bimbingan

KBRI Kuala Lumpur juga telah berupaya untuk meningkatkan akses Pendidikan dasar anak PMI khususnya yang tidak berdokumen resmi, dengan cara memberikan Pendidikan non formal yang disalurkan melalui program sanggar bimbingan, yang tersebar hampir di seluruh semenanjung Malaysia, dan KBRI Kuala Lumpur juga memberikan tenaga sukarelawan mengajar melalui skema mahasiswa KKN serta guru-guru dari Sekolah Indonesia Kuala Lumpur. Selain itu Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam upaya dalam memberikan akses pendidikan dasar, malalui program

sanggar bimbingan yang dimana upaya yang telah di lakukan antara lain:

1. Ujian Persamaan

Dalam memberikan upayanya untuk akses pendidikan dasar kepada anak PMI KBRI Kuala Lumpur sendiri memberikan fasilitas untuk mengikuti ujian persamaan yang diselenggarakan oleh KBRI yang dimana para siswa dari sanggar tersebut setelah melakukan pembelajaran di sanggar bimbingan setingkat SD dan SMP dapat mengikuti ujian persamaan tersebut.

Dalam menjalani proses pembelajaran yang dilakukan oleh seluruh Lembaga Pendidikan yang di bentuk oleh KBRI Kuala Lumpur, senantiasa memberikan fasilitas untuk para siswa-siswinya yaitu dengan mengadakan ujian persamaan yang dilakukan di setiap tahu untuk kelas 6, 9, dan 12. Guna untuk menilai hasil dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh para siswa-siswi yang mengenyam Pendidikan di semua Lembaga Pendidikan yang di bentuk oleh KBRI Kuala Lumpur.

2. Beasiswa

Upaya KBRI Kuala Lumpur dalam memberikan pendidikan dasar untuk para anak PMI yang berada di Malaysia, selain mengadakan ujian persamaan untuk para siswa-siswinya KBRI yang bekerja sama dengan KEMENDIKBUD Republik Indonesia, menyediakan juga beasiswa bagi siswa-siswi yang mengenyam Pendidikan di semua Lembaga Pendidikan yang di bentuk oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia, yaitu Beasiswa ADEM dan ADIK, yang diharapkan beasiswa ini dapat menjadi motivasi para siswa-siswi untuk dapat melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Skema beasiswa yang di skemakan oleh KBRI Kuala Lumpur berguna untuk para siswa-siswi yang mengenyam pendidikan di seluruh Lembaga pendidikan formal maupun non-formal yang berada di seluruh Malaysia.

Beasiswa ini ada yang berasal dari pemerintah yaitu beasiswa afirmasi pendidikan tinggi dan afirmasi menengah dan beserta Yayasan yang memberikan beasiswa kepada seluruh siswa-siswi yang ada di Malaysia. Dan untuk tahun ini ada sekitar 417 siswa siswi yang berhasil lolos mendapatkan beasiswa penuh dari pemerintah dan ada juga dari Yayasan yang di terbitkan oleh provinsi tempat para siswa-siswi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1. Kesimpulan

KBRI Kuala Lumpur adalah perpanjangan dari pemerintah Indonesia yang menjadi perwakilan Indonesia di Malaysia yang mengurus pembentukan sanggar bimbingan yang menjadi salah satu program kerja yang dilaksanakan oleh KBRI Kuala Lumpur guna untuk meningkatkan akses Pendidikan dasar bagi anak-anak pekerja migran Indonesia yang berada wilayah Malaysia. Program kerja sanggar bimbingan ini dalam menjalankan kinerjanya di bantu juga oleh Sekolah Indonesia Kuala Lumpur sebagai kepala koordinator kurikulum.

SB yang di dirikan KBRI Kuala Lumpur ini menyediakan beasiswa yang bisa di peruntukan oleh siswa-siswi yang mengenyam Pendidikan di semua Lembaga Pendidikan Indonesia yang berada di Malaysia, beasiswa ini di bagi menjadi dua yaitu ADEM dan ADIK yang di mana beasiswa tersebut merupakan beasiswa yang bekerja sama dengan pemerintah Republik Indonesia khususnya KEMENDIKBUD Republik Indonesia.

Dalam mendukung kinerja KBRI dalam memenuhi hak-hak anak PMI di Malaysia, Kedutaan melayani penerbitan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK) yang di terbitkan konsuler yang berguna untuk menjadi syar dokumen pendukung untuk

membuat paspor dan mendaftar di Lembaga Pendidikan Indonesia yang berada di Malaysia baik itu sanggar bimbingan ataupun Lembaga Pendidikan lainnya.

Akan tetapi KBRI Kuala Lumpur dalam menjalankan tugasnya sebagai kantor perwakilan yang menjadi pelopor terbentuknya sanggar bimbingan yang ada di wilayah Malaysia. Mengalami beberapa kendala yang dihadapi, kendala terbesar yang dihadapi oleh KBRI Kuala Lumpur ialah perizinan pembentukan SB yang ada di Malaysia karena sampai dengan saat ini pemerintah Malaysia masih belum memberikan izin secara resmi kepada setiap sanggar bimbingan khususnya yang berada di wilayah semenanjung Malaysia.

KBRI Kuala Lumpur sendiri telah melakukan berbagai koordinasi dan diplomasi baik itu dengan pemerintah Malaysia maupun pemerintah Indonesia untuk menanggulangi permasalahan legalitas tersebut, antara lain dengan cara melobi Kementerian Pendidikan dari kedua negara guna untuk mendiskusikan bagaimana agar sanggar bimbingan bisa legal secara hukum dan setiap sanggar bimbingan bisa dengan leluasa menjalankan setiap kegiatan dan pembelajaran.

5.2. Rekomendasi

Terakhir dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa saran yang dapat di pergunakan kedepannya antara lain:

Kedepannya diharapkan pemerintah Indonesia yang berkoordinasi dengan KBRI agar lebih memperhatikan anak-anak WNI di Malaysia khususnya para PMI yang menetap di Malaysia agar bisa mendapatkan akses pendidikan dasar yang layak dengan cara memfasilitasi anak-anak tersebut untuk dapat belajar di setiap sanggar bimbingan dan pemerintah Indonesia juga bisa memberikan fasilitas yang memadai untuk menunjang setiap pembelajaran yang dilakukan oleh sanggar bimbingan.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku:

- Darmayadi, A. 2015. *Mengenal Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Zavara.
- Marsh, David dan Stoker Gerry. 2011. *Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Muladi. 2007. *Hak Asasi Manusia, Bandung (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perpektif Hukum dan Masyarakat)*. Pt Refika Aditama.
- Rusdiyanta. 2023. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Depok: Kharisma Putra Utama Offset.
- Shoelhi, Mohammad. 2011. *Diplomasi Praktik Komunikasi Internasional*. Bandung: Siramedia.
- Theodore Couloumbis, James Wolfe. 2004. *Pengantar Hubungan Internasional*. Jakarta: Putra Abardin.
- Wihtol Catherine. 2023. *Migration and International Relations*. Paris: IMISCOE Short Reader.
- Yani, Moch Yanyan dan Perwita Banyu. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Acuan artikel dalam jurnal:

2015. "Sekuritisasi Pangan Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015", dalam Google.co.id website: https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=XLAbpwwAAAAJ&citation_for_view=XLAbpwwAAAAJ:d1gkVwhDpl0C, diakses 16 Mei 2024.
2022. "Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Melalui Sister Province

- Dengan Republik Bashkortostan Rusia”, dalam Google.co.id website: https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=vlsz62cAAAAJ&citation_for_view=vlz62cAAAAJ:Zph67rFs4hoC, diakses 16 Mei 2024.
2024. “View of Motivasi Calon Pekerja Migran Indonesia Bekerja ke Luar Negeri dan Kontribusinya Bagi Negara Indonesia”, dalam Penerbit.org website: <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/metta/article/view/3364/1584>, diakses 16 Agustus 2024.
- Anis Rohadatul Niehlah, Adi Jufriansah, Azmi Khusnani, Irfan Miftahul Fauzi, & Tria Puspita Sari. 2023. “Penguatan Pendidikan sebagai Upaya untuk Meningkatkan Kemampuan Jasmani bagi Anak Pekerja Migran di Sanggar Bimbingan Malaysia”, dalam *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar*, 105–122. <https://doi.org/10.56972/jikm.v3i2.127>
- Haning Romdiati. 2016. “Globalisasi Migrasi Dan Peran Diaspora: Suatu Kajian Pustaka”, dalam *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(2), 89–100. <https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/69/68>.
- JSTOR. 2024. “Foreign Policy Makers and Their National Role Conceptions on JSTOR”, dalam Jstor.org website: https://www.jstor.org/stable/2600291?searchText=&searchUri=&ab_segments=&searchKey=&refreqid=fastly-default%3A9ee6d3b2922214c7c14ca0f11099d90f&seq=4, diakses 14 Mei 2024.
- JSTOR. 2024. “International Migration on JSTOR”, dalam Jstor.org website: https://www.jstor.org/stable/2945981?searchText=international+migration&searchUri=%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3Dinternational%2Bmigration%26so%3Drel&ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2_SYC-7149%2Ftest&refreqid=fastly-default%3A0d5c3377ba05fa3e49a53a54100266fd, diakses 14 Mei 2024.
- JSTOR. 2024. “National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy on JSTOR”, dalam Jstor.org website: https://www.jstor.org/stable/3013584?searchText=&searchUri=&ab_segments=&searchKey=&refreqid=fastly-default%3A85e3148e64f941d3f6c3d4d4f6e8766b, diakses 14 Mei 2024.
- Novia, H. 2023. “Dinamika Diplomasi Indonesia Terkait Pemenuhan Akses Pendidikan Anak Pekerja Migran Indonesia di Sarawak Malaysia”, dalam *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 15(2), 1–22. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v15i2.8393.g5546>.
- Oktaviandono Oktaviandono, & Muhammad Zuhdi Syahputra. 2021. “Kerjasama Indonesia Dan International Labour Organization Dalam Melindungi Wni Sebagai Pekerja Migran Di Malaysia Melalui Program Decent Work Country Programmes (Dcwp)”, dalam *Jurnal Sains Riset*, 11(2), 155–169. <https://doi.org/10.47647/jsr.v11i2.485>.
- Sitti Magfirah Makmur, Rahmat Dunggio, Moh. Ziad Pilomonu, & Rizki Maulana. 29 Juni 2023. “Penguatan Nasionalisme Melalui Pembelajaran Pancasila dan Metode Repetisi bagi Siswa di Sanggar Bimbingan”, dalam ResearchGate website: https://www.researchgate.net/publication/377579233_Penguatan_Nasionalisme_Melalui_Pembelajaran_Pancasila_dan_Metode_Repetisi_bagi_Siswa_di_Sanggar_Bimbingan_Rawang_Selangor_Malaysia, diakses 9 Mei 2024.

Acuan artikel dalam website:

- 3 Mei 2023. “Dubes Hermono Sebut Jumlah PMI Ilegal di Malaysia Lebih Banyak 4 Kali Lipat P2MI Projo”, dalam <https://p2miprojo.com/publikasi/berita/3110/dubes-hermono-sebut-jumlah-pmi-ilegal-di-malaysia-lebih-banyak-4-kali-lipat/>, diakses 9 Mei 2024.
- BBC News Indonesia. Maret 2023. “Meriance Kabu: Mantan pekerja migran yang selamat dari penyiksaan di Malaysia”, dalam <https://www.facebook.com/bbcnews>, BBC News Indonesia website: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-64250702>, diakses 16 Agustus 2024.
- Berita - Organisasi Kemahasiswaan. 2021. Dalam [Stekom.ac.id website: https://ormawa.stekom.ac.id/berita/kerjasama-internasional-antar-bangsa](https://ormawa.stekom.ac.id/berita/kerjasama-internasional-antar-bangsa), diakses 30 April 2024.
- Borneonews.co.id. 2024. “3.115 WNI Ikuti Pemulangan dari Malaysia dalam Seminggu Terakhir”, dalam [Borneonews.co.id website: https://www.borneonews.co.id/berita/333001-3-115-wni-ikuti-pemulangan-dari-malaysia-dalam-seminggu-terakhir](https://www.borneonews.co.id/berita/333001-3-115-wni-ikuti-pemulangan-dari-malaysia-dalam-seminggu-terakhir), dalam 16 Agustus 2024.
- Borneonews.co.id. 2024. “471 Anak Pekerja Migran di Malaysia Lanjutkan Pendidikan ke Indonesia”, dalam [Borneonews.co.id website: https://www.borneonews.co.id/berita/347398-471-anak-pekerja-migran-di-malaysia-lanjutkan-pendidikan-ke-indonesia](https://www.borneonews.co.id/berita/347398-471-anak-pekerja-migran-di-malaysia-lanjutkan-pendidikan-ke-indonesia), diakses 14 Agustus 2024.
- Darmono Darmono, Merlin, M., & Rizki Maulana. 2023. “Pentingnya Pendidikan Anak Bangsa Di Sanggar Bimbingan Rawang, Malaysia”, dalam *Selaparang: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 7(2), 1228–1231.
- <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jpmb/article/view/15179/7110>.
- Deri Dahuri. 28 Mei 2023. “129 Anak Pekerja Migrandi Malaysia Ikuti Wisuda Program Paket A, B, dan C”, dalam [Mediaindonesia.com website: https://mediaindonesia.com/humaniora/584828/129-anak-pekerja-migrandi-malaysia-ikuti-wisuda-program-paket-a-b-dan-c](https://mediaindonesia.com), diakses 14 Agustus 2024.
- Google Books. 2021. “Teori-Teori Migrasi Internasional”, dalam [Google Books website: https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=T55BEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=migrasi+internasional&ots=pHU73JDwxy&sig=CpyvwLZDYbdx5jxDvwGR4HiH-9Y&redir_esc=y#v=onepage&q=migrasi%20internasional&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=T55BEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=migrasi+internasional&ots=pHU73JDwxy&sig=CpyvwLZDYbdx5jxDvwGR4HiH-9Y&redir_esc=y#v=onepage&q=migrasi%20internasional&f=false), diakses 10 Mei 2024.
- Hukumonline, T. 30 September 2022. “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, dalam [hukumonline.com website: https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2), diakses 10 Mei 2024.
- Iom.int. 2023. “Memperkuat Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia”, dalam [Iom.int website: https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia](https://indonesia.iom.int/id/news/memperkuat-perlindungan-pekerja-migran-indonesia-di-malaysia), diakses 9 Mei 2024.
- Katriana. 30 Desember 2019. “Sepanjang 2019 BNP2TKI selesaikan 3.380 kasus pekerja migran Indonesia”, dalam [Antara News website: https://www.antaraneews.com/berita/1229059/sepanjang-2019-bnp2tki-selesaikan-3380-kasus-pekerja-migran-indonesia](https://www.antaraneews.com/berita/1229059/sepanjang-2019-bnp2tki-selesaikan-3380-kasus-pekerja-migran-indonesia), diakses 30 April 2024.

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2018. “Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru MALAYSIA”, dalam Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia website: https://www.kemlu.go.id/johorbahru/id/pages/hubungan_bilateral_indonesia_-_malaysia/5627/etc-menu, diakses 13 Agustus 2024.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2024. “Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Penang Malaysia”, dalam Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia website: <https://www.kemlu.go.id/penang/id/read/malaysia/950/etc-menu>, diakses 15 Agustus 2024.
- Ksp.go.id. 2023. “Deputi II KSP : Anak PMI di Malaysia Harus Dapat Hak Akses Pendidikan yang Sama – Kantor Staf Presiden”, dalam Ksp.go.id website: <https://www.ksp.go.id/deputi-ii-ksp-anak-pmi-di-malaysia-harus-dapat-hak-akses-pendidikan-yang-sama.html>, diakses 9 Mei 2024.
- Sekolahindonesia.edu.my. 9 Desember 2022. “KBRI Kuala Lumpur Selenggarakan Rapat Koordinasi Pendidikan Non-Formal Tahun 2022 – Sekolah Indonesia Kuala Lumpur”, dalam Sekolahindonesia.edu.my website: <https://sekolahindonesia.edu.my/web2/kbri-kuala-lumpur-selenggarakan-rapat-koordinasi-pendidikan-non-formal-tahun-2022/>, diakses 6 Juni 2024.
- Setiawan, A. 26 November 2019. “Sanggar Bimbingan anak WNI di Semenanjung Malaysia berdiri”, dalam Antara News KL website: <https://kl.antaranews.com/berita/5955/sanggar-bimbingan-anak-wni-di-semenanjung-malaysia-berdiri>, 6 Juni 2024.
- Setyorini, V. P. 10 Januari 2023. “Malaysia kembali laksanakan program rekalibrasi tenaga kerja”, dalam Antara News website: <https://www.antaranews.com/berita/3344256/malaysia-kembali-laksanakan-program-rekalibrasi-tenaga-kerja>, diakses 30 April 2024.
- Sumutprov.go.id. 26 Oktober 2019. “Korban Pekerja Migran di Bawah Umur di Malaysia, Tim Pemprov Berupaya Pulangkan Sondang Rohana ke Sumut | Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara”, dalam Sumutprov.go.id website: <http://badanpenghubung.sumutprov.go.id/2019/10/26/korban-pekerja-migran-di-bawah-umur-di-malaysia-tim-pemprov-berupaya-pulangkan-sondang-rohana-ke-sumut/>, diakses 30 April 2024.